

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN**

Disampaikan Oleh : M. Nasir Djamil, M.Si.

No. Anggota : A - 84

Dibacakan Pada Rapat Paripurna DPR RI

Jakarta, 23 Agustus 2016

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2017 BESERTA NOTA KEUANGAN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disampaikan oleh : M. Nasir Djamil, M.Si.

Nomor Anggota : A - 84

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita semua, bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 71 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita juga memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemampuan untuk dapat merealisasikan esensi dari amanat kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2017 Beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, kita dapat memahami titik pencapaian di berbagai bidang dalam rangkaian perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini. Kita juga dapat memahami berbagai tantangan dan langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Fraksi PKS berpandangan bahwa sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antar benua dan antar samudera, serta dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah, seharusnya Indonesia sudah menjadi Negara yang besar dan rakyatnya makmur-sejahtera.

Fraksi PKS berpandangan bahwa secara umum terdapat sejumlah pencapaian positif dalam berbagai bidang sebagai buah dari 18 tahun reformasi, meskipun masih jauh dari memuaskan. Dalam ranah politik kita mengalami kemajuan dalam berdemokrasi, sehingga Indonesia diakui di dunia internasional sebagai salah satu negara demokrasi yang terbesar. Meski kita juga merasakan bahwa demokrasi kita belum benar-benar berkualitas karena belum sampai pada tujuan berdemokrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setelah 71 tahun merdeka, kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental terkait kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan daya saing bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi sebagaimana dicita-citakan para pendiri Republik masih belum terwujud. Kondisi perekonomian nasional juga masih mengkhawatirkan seiring masih terbatasnya daya beli rakyat, belum bergairahnya dunia usaha, dan lambannya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya 4,8 persen, terendah dalam 5 tahun terakhir dan jauh dari target pertumbuhan 2015 sebesar 5,7 persen. Demikian juga pertumbuhan ekonomi semester pertama 2016 yang hanya mencapai 5,04 persen masih belum memuaskan. Yang juga mengkhawatirkan adalah merosotnya daya saing ekonomi kita sebagai sebuah bangsa, dimana dalam *Global Competitiveness Report* 2015-2016 turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara.

Fraksi PKS kembali menyeru seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki sistem politik dan pemilu, serta mendorong institusi-institusi demokrasi agar semakin berkualitas dan matang. Sehingga demokrasi dapat mengantarkan seluruh rakyat Indonesia menuju kehidupan yang adil dan makmur.

Secara umum Fraksi PKS memandang bahwa RAPBN tahun 2017 yang diajukan masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, realistis, kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Oleh karena itu terkait RAPBN tahun 2017, Fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan secara lebih mendalam pada bagian berikut.

**A. Asumsi Ekonomi Makro**

Fraksi PKS memberi catatan secara lebih khusus atas asumsi ekonomi dan indikator kesejahteraan dan asumsi ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2017 sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen masih terlalu ambisius, karena banyaknya tantangan ekonomi global maupun daya serap ekonomi domestik yang belum pulih. Selain itu, rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi sejak 2015 masih di bawah 5 persen. Pemerintah harus menetapkan target pertumbuhan yang lebih realistis, sehingga juga lebih kredibel. Bagian terpenting dari target pertumbuhan ekonomi adalah kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan (kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan IPM).

Beberapa tantangan faktor yang harus diperhatikan pemerintah dari perkembangan ekonomi global adalah: (i) keberlanjutan pelemahan ekonomi Tiongkok, sebagai imbas proses *rebalancing*, (ii) pemulihan ekonomi Amerika Serikat serta penantian keputusan penaikan suku bunga the Fed, (iii) penurunan permintaan dan harga komoditas dunia, dan (iv) kebijakan suku bunga negatif beberapa bank sentral dunia. Dengan demikian situasi, kinerja ekspor, aliran investasi langsung diproyeksi belum membaik pada 2017. Ke depan pemerintah harus berupaya meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia sehingga tidak hanya mengandalkan komoditas mentah.

Fraksi PKS meminta pemerintah harus mempercepat perbaikan iklim investasi, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Target perbaikan iklim usaha bukan hanya bergerak di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah sebagai tujuan investasi. Pemerintah juga harus meningkatkan efektivitas paket-paket kebijakan ekonomi, terutama yang berorientasi pada pemberdayaan sektor riil. Disamping itu, dalam upaya memberikan manfaat yang lebih belanja pemerintah, maka perlu memperbaiki kualitas realisasinya. Selama ini, pola konsumsi pemerintah masih tetap sama yakni menumpuk pada akhir-akhir tahun fiskal (triwulan III dan IV). Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat belanja daerah karena kebijakan lelang telah dapat dilaksanakan pada Triwulan IV tahun sebelumnya.

Topangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi pada gilirannya menciptakan struktur ekonomi rapuh, sehingga tidak berperan besar terhadap perbaikan indikator sosial. Hal ini disebabkan, karena pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi sebagian besar digerakkan oleh masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat pendapatan bawah cenderung pasif. Masyarakat bawah sulit naik kelas, karena tertekan oleh masalah-masalah ekonomi mendasar seperti inflasi (inflasi harga pangan, *volatile food*). Sedangkan golongan menengah dan atas sudah tidak begitu terganggu dengan tekanan inflasi.

Selain itu Pemerintah perlu memberikan *roadmap* yang jelas, bagaimana membangun basis industri dan produksi yang kuat. Tanpa industrialisasi dan pengembangan inovasi teknologi yang kuat, kita akan sulit menjadi bangsa produsen. Ketiadaan kebijakan industrial selama ini telah menimbulkan komplikasi yang serius dan telah berdampak pada neraca perdagangan selalu defisit sejak tahun 2012. Kebijakan peningkatan kemampuan industri nasional juga sangat penting, sehingga tercapai kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor (terutama bahan baku industri). Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing produk sehingga pada tahapan selanjutnya dapat lebih kompetitif di pasar internasional.

Fraksi PKS memandang bahwa pertumbuhan yang lebih berkualitas dan lebih tinggi, sangat penting melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kualitas pertumbuhan selama ini telah menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Pertumbuhan yang lebih berkualitas dan tinggi ke depan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat.

Potensi ekonomi nasional untuk tumbuh lebih berkualitas dan lebih tinggi, sangat mungkin dicapai dengan dukungan utama pasar domestik. Dengan kontribusi konsumsi masyarakat yang besar, telah menjadi jangkar penting. Untuk itu kebijakan komprehensif terutama untuk menjaga dan meningkatkan daya beli rakyat yang berdimensi jangka pendek dan jangka panjang sangat penting. Ke depan, pertumbuhan akan lebih baik jika peran konsumsi modal pemerintah semakin optimal. Terkait ekspor, pemerintah perlu mendesain arah pembangunan industri nasional yang kokoh dan terintegrasi dengan dukungan keunggulan sumber daya alam, sektor maritim dan sektor pertanian. Pemerintah juga perlu secara sungguh-sungguh membenahi infrastruktur energi dan sistem logistik nasional agar lebih efisien dan kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat *non tradable* juga perlu diperbaiki secara serius.

Fraksi PKS berpandangan pemerintahan perlu untuk lebih serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, meningkatkan daya saing dan investasi, membangun sektor pertanian, maritim dan industri nasional secara terintegrasi. Secara khusus pemerintah juga perlu meningkatkan belanja modal dan investasi terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, maritim dan industri manufaktur nasional serta infrastruktur energi dan konektivitas, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

1. Fraksi PKS menilai, pemerintah seharusnya menargetkan inflasi yang lebih rendah, di bawah 4 persen. Hal itu diharapkan dapat membentuk eskpektasi masyarakat ke depan secara lebih baik. Mencapai inflasi yang stabil dan relatif rendah akan berdampak pada daya beli masyarakat, serta mendukung iklim usaha dan investasi. Dalam kaitannya dengan memperbaiki daya beli masyarakat, maka pemerintah harus mampu menekan inflasi pangan lebih rendah. Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan terutama pada hari-hari besar nasional, sehingga tidak terjadi lonjakan harga signifikan. Pemerintah harus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki distribusi barang dan jasa, serta konektifitas nasional sehingga inflasi dapat ditekan lebih rendah.
2. Fraksi menilai bahwa target nilai tukar rupiah sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat terlalu optimis karena fundamental ekonomi belum sepenuhnya membaik. Perkembangan nilai tukar rupiah pada 2017 diprediksi tidak jauh berbeda dengan 2016. Beberapa hal yang memengaruhi stabilitas rupiah 2017 adalah: (i) masih dangkalnya pasar keuangan domestik, terutama pada transaksi valas, (ii) tingginya kebergantungan valas domestik terhadap pasokan asing non-resident; (iii) masih buruknya kinerja ekspor; (iv) minimnya aliran Devisa Hasil Ekspor (DHE); (v) masih tingginya defisit neraca transaksi; serta (vi) tingginya kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan kegiatan impor. Dalam upaya meningkatkan stabilitas rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus meningkatkan akumulasi cadangan devisa sebagai peyangga nilai tukar saat terjadinya gejolak. Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus memperluas *bilateral swap agreement* untuk mengurangi ketergantungan terhadap *Dollar*.
3. Fraksi menilai suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen terlalu tinggi, karena dapat ditekan lebih rendah pada kisaran 5 persen. Untuk mencapai hal itu, maka pemerintah harus memperbaiki iklim investasi, termasuk risiko negara. Tingginya SPN bukan hanya menunjukkan bahwa fundamental ekonomi tidak membaik, tetapi akan memengaruhi beban APBN ke depan. Suku bunga SPN tinggi akan memunculkan potensi *crowding out*, sehingga upaya mencapai *single digit interest* akan sulit tercapai.
4. Terkait asumsi harga minyak 2017 yang ditetapkan sebesar 45 dollar AS per barel,Fraksi PKS memandang perlu dicermati secara lebih tajam. Fraksi PKS menilai bahwa pergerakan ICP di tahun 2017 akan sangat fluktuatif dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengingat dinamika harga minyak dunia dan *trend*-nya kedepan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional. Hal ini sangat penting mengingat persoalan harga minyak tidak hanya terkait *demand* dan *supply*, tetapi juga dipengaruhi faktor politik internasional, kepercayaan terhadap ekonomi dan juga dampak spekulasi. Untuk itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan *trend-*nya kedepan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (*hedging*) dan memperkuat cadangan yang memungkinkan untuk stabilisasi.
5. Terkait asumsi target lifting minyak sebesar 780 ribu barel per hari, Fraksi PKS memandang perlu dilakukan kebijakan yang lebih kuat agar dapat ditingkatkan dan tercapai. Dalam beberapa tahun terakhir lifting minyak juga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBN. Fraksi PKS memandang bahwa pengelolaan sektor migas nasional mengalami kemunduran yang sangat signifikan dan berlangsung terus menerus serta belum dianstisipasi dengan kebijakan yang memadai. Meski target telah diturunkan, dalam beberapa tahun terakhir target lifting minyak tersebut juga tidak mampu dicapai. Permasalahan mendasar seperti; sumur tua, rendahnya investasi dan hubungan kelembagaan antar pengelola dan pemerintah selalu menjadi lingkaran jebakan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Fraksi PKS memandang pemerintah perlu melakukan terobosan baru untuk dapat mencapai target tersebut. Faktor penting dan mendesak diantaranya adalah penyelesaian perubahan RUU Migas yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam menggairahkan kembali investasi di sektor Migas.
6. Terkait lifting gas tahun 2017 sebesar 1,15 juta barel setara minyak perhari, Fraksi PKS memandang bahwa lifiting gas masih bisa ditingkatkan.Selain itu pemerintah harus memprioritaskan gas sebagai energi alternatif terutama untuk memperkokoh dan mendorong ekspansi industri nasional. Gas harus dipandang sebagai modal pembangunan sebagaimana amanat UU, bukan sekedar komoditas. Pemerintah juga perlu melakukan pembaharuan harga gas melalui renegosiasi dengan KKKS secara sungguh-sungguh. Selain itu, Fraksi PKS juga konsisten mengusulkan ditambahkannya indikator harga gas, yang disebut *Indonesian Gas Price* (IGP), untuk melengkapi lifting gas.

**B. Indikator Kesejahteraan**

Fraksi PKS memberi catatan secara lebih khusus atas Indikator Kesejahteraan dalam RAPBN tahun 2017, sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai bahwa target kemiskinan 9,5-10,5 persen masih terlalu rendah, karena posisi persentase penduduk miskin pada Maret 2016, telah berada pada 10,8 persen. Hal ini memunculkan mengkhawatiran bahwa pemerintah akan cenderung menargetkan penurunan persentase penduduk miskin pada level atas 10,5 persen, sehingga adanya kelemahan dalam pengukuran terhadap pencapain Indikator Kesejahteraan pada akhir tahun. Sehingga, perlu menetapkan target kemiskinan (dan pengangguran) pada satu nominal angka, misalnya 10 persen. Hal ini sangat penting, agar lebih mudah mengevaluasinya. Fraksi PKS konsisten memandang masih diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama agar menyelesaikan pada akar kemiskinan perdesaan dan pertanian. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan pada Maret 2016, tingkat kedalaman kemiskinan justru mengalami peningkatan tajam, dimana pada periode tersebut indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 1,94, meningkat dibanding September 2016 yang hanya 1,84. Fraksi PKS mendukung langkah yang sudah ditempuh Pemerintah untuk merealisasikan kebijakan Reforma Agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah petani atau kelompok petani di perdesaan, meski kebijakan ini masih membutuhkan langkah yang lebih kokoh. Kebijakan pemerintah harus serius menyasar kemiskinan di perdesaan yang lebih kuat. Sepanjang September 2015-Maret 2016, terjadi lonjakan persentase penduduk miskin di perdesaan, dari 14,09 persen menjadi 14,11 persen. Untuk itu, perlu meningkatkan alokasi dan efektivitas dana desa dan transfer daerah. Pembangunan infrastruktur dan program-program ekonomi dipedesaan perlu lebih masih dan kreatif. Fraksi PKS juga mendesak agar basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, dengan menjaga inflasi perdesaan, Nilai Tukar Petani, dan perbaikan upah buruh.
2. Fraksi PKS menilai bahwa target pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 5,3-5,6 persen perlu ditetapkan lebih rendah dan harus diikuti dengan berbagai upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Perkembangan TPT pada Februari 2016 mencapai 5,5 persen sedikit menurun dari 5,81 persen bulan yang sama tahun lalu. Beberapa persoalan ketenagakerjaan nasional adalah: (i) relatif tinggi TPT di perkotaan mencapai 6,5 persen, yang disebabkan derasnya arus urbanisasi; (ii) tingkat pengangguran pada pendidikan tinggi seperti Diploma dan universitas masih cukup besar masing-masing 7,22 persen dan 6,22 persen. Pengangguran tertinggi berada di SMK mencapai 9,84 persen; (iii) sebanyak 61,26 persen tenaga kerja yang bekerja berpendidikan rendah; sedangkan 27,4 persen berpendidikan menengah dan 11,34 persen berpendidikan tinggi; (iv) sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi penopang penyerapan tenaga kerja di tengah-tengah penurunan kinerjanya; (v) persentase penduduk bekerja di sektor informal masih tinggi 58,28 persen; (vi) pada Februari, 25,9 juta (71,23 persen) tenaga kerja yang bekerja termasuk kategori pekerja paruh waktu; sementara sebanyak 10,4 juta (28,77 persen) termasuk setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan).

Upaya pemerintah untuk mencapai target TPT tahun 2017 akan menghadapi berbagai tantangan seperti: (i) derasnya aliran tenaga kerja asing, yang berpotensi mencaplok lapangan kerja tenaga kerja nasional; (ii) pertumbuhan sektor-sektor padat karya (*tradable*) masih rendah; (iii) kualitas pertumbuhan ekonomi semakin turun, yang tergambar dari elastisitas penyerapan tenaga kerja. Pemerintah harus mengakselerasi kualitas pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah harus menjaga pertumbuhan sektor-sektor padat karya, dengan berupaya menggiring investasi langsung ke sektor-sektor tersebut. Pemerintah ke depan juga harus memperhatikan penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang menunjukkan bagaimana kualitas tenaga kerja. Kondisi *mismatch* di pasar tenaga kerja, dimana lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah ternyata semakin sulit mendapatkan pekerjaan harus mendapat perhatian khusus. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia harus dilakukan secara lebih kuat, sehingga tenaga kerja dapat terserap lebih banyak ke pasar kerja. Badan Pusat Statistik pada Februari 2016 mengungkap bahwa pendidikan tenaga kerja sekitar 61 persen masih berpendidikan rendah. Kualitas SDM yang rendah akan berdampak pada realisasi investasi ke depan. Tantangan terhadap kualitas SDM juga semakin besar setelah implementasi MEA.

1. Fraksi PKS menilai bahwa target Penurunan Tingkat Kesenjangan (*Gini Ratio*) menjadi 0,38 persen tahun 2017 terlalu optimis, melihat perkembangan penurunan kesenjangan dan prognosa yang akan dicapai tahun 2016 serta belum didukung oleh kebijakan yang memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat *gini ratio* hingga Maret 2016 masih sebesar 0,397; September 2015 berada di level 0,402; dan Maret 2015 pada kisaran 0,408 dengan trend sedikt menurun. Dengan demikian target *gini ratio* dalam APBNP 2016 sebesar 0,39 masih belum meyakinkan dapat dicapai. Walaupun terjadi tren penurunan angka gini ratio, tapi perlu diperhatikan bahwa kontribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah justru mengalami penurunan. Pada maret 2015, kontribusi pada kelompok tersebut mencapai 17,1 persen, dan mengalami penurunan menjadi 17,02 persen pada Maret 2016. Hal ini menjadi indikasi bahwa turunnya gini ratio belum menguntungkan masyarakat termisikin, karena turunnya gini ratio lebih didorong oleh semakin sejahteranya kelas menengah Indonesia. Laporan Bank Dunia, juga telah memberikan *warning* potensi ledakan sosial akibat "Ketimpangan yang Semakin Lebar". Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu sama 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan tak lebih dari 25 persen. Saat ini faktanya telah terjadi efek konsentrasi ke atas (*trickle-up effect*) dalam proses pembangunan dalam beberapa tahun terakhir dan pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat. Selain itu, berbagai upaya untuk mendorong aktivitas berorientasi pada masyarakat golongan menengah ke bawah juga belum terlaksana dengan baik. Beberapa indikatornya adalah: (i) masih tingginya inflasi di perdesaan, terutama pada bahan makanan; (ii) nilai tukar petani belum membaik secara signifikan; (iii) masih minimnya realisasi kredit UMKM, hanya 18 persen dari total kredit perbankan; serta (iv) implementasi paket kebijakan pemerintah belum menyentuh golongan menengah ke bawah.
2. Fraksi PKS menilai target target Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,3 harus mampu memperbaiki kondisi sosial di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah harus menjaga dan meningkatkan efektivitas dana desa, jangkauan listrik, jangkauan keuangan (*financial inclusion*), mendorong realisasi penanaman modal. Selain itu, pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional. Pada 2015, hanya 9 provinsi yang memiliki IPM di atas nasional, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepri, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Sumatera Barat. Selain itu Fraksi PKS memandang target peningkatan Indeks Daya saing juga perlu dimasukkan dalam RAPBN 2017.

**C. Postur dan Pendapatan Negara**

Terkait dengan Postur RAPBN Tahun 2017, secara umum Fraksi PKS memandang bahwa masih perlu dipertajam dan didisain lebih progresif untuk mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai target penerimaan perpajakan masih terlalu optimis, sehingga resiko *shortfall* akan besar. Realisasi penerimaan perpajakan Semester I-2016 yang bahkan Rp 11 Triliun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015 seharusnya bisa menjadi acuan Pemerintah untuk menyusun target penerimaan perpajakan yang lebih rasional. Selama ini target penerimaan perpajakan juga selalu tidak tercapai, sehingga target ini juga dapat dikatakan masih terlalu ambisius. Beberapa potensi yang menyebabkan risiko *shortfall* penerimaan pajak yaitu: pertama, harga komoditas dunia masih belum membaik; kedua, tertutupnya peluang-peluang pemerintah untuk menarik sumber penerimaan pajak, terutama dari sanksi maupun investigasi, karena digulirkannya program pengampunan pajak; dan ketiga, rencana pemerintah menurunkan tarif PPh badan. Fraksi PKS memandang target penerimaan perpajakan harus ditetapkan lebih kredibel karena akan berpengaruh signifikan terhadap komponen-komponen lain dalam APBN, terutama realisasi defisit dan utang, serta beban biaya bunga utang yang akan ditanggung ke depan.
2. Meski demikian Fraksi PKS menilai bahwa pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan pada dasarnya masih jauh dari optimal. *Tax ratio* yang stagnan dan bahkan menurun beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Direktorat Perpajakan, jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya sebesar 30,04 juta (2,4 juta WP Badan, 5,24 juta WP Pribadi Non-karyawan dan 22,4 juta WP Pribadi Karyawan). Padahal, menurut data BPS jumlah pekerja di Indonesia mencapai 93,72 juta, atau artinya hanya 29,4% yang terdaftar sebagai wajib pajak. Salah satu kebijakan besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang belum diselesaikan pemerintah adalah reformasi perpajakan, yang menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu lebih serius untuk melanjutkan pengusutan penggelapan pajak dari aktivitas 2.000 PMA dengan potensi pajak yang hilang mencapai Rp500 triliun yang sering disampaikan Menteri Keuangan pada berbagai media. Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh untuk mereduksi praktik *transfer pricing* khususnya oleh perusahaan asing.
3. Fraksi PKS melihat bahwa kebijakan pemotongan pajak (*tax cut*) yang dilakukan oleh Pemerintah perlu diarahkan agar menghasilkan stimulus yang optimal. Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan pemotongan pajak, pertama dengan meningkatkan PTKP, kedua rencana penurunan PPh Badan. Meningkatkan PTKP artinya memperbesar *disposable income* (uang yang diterima) oleh pekerja, sehingga daya beli mereka semakin meningkatkan. Peningkatan daya beli tersebut diharapkan dapat meningkatkan permintaan *aggregate* yang pada akhirnya mendorong perekonomian. PPh Badan rencananya akan diturunkan oleh Pemerintah, dari awalnya 25 persen menjadi 17 persen. Secara umum, turunnya PPh Badan diharapkan mengurangi beban dari perusahaan, sehingga mereka memiliki dana tambahan untuk investasi. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemotongan pajak berarti menghilangkan potensi perpajakan, yang artinya negara akan menanggung beban tambahan. Apabila pemotongan pajak berasal dari peningkatan defisit, maka efek positif dari pemotongan pajak akan tereliminasi dari efek negatif peningkatan defisit anggaran.
4. Fraksi PKS menilai Pemerintah harus mengoptimalkan sistem logistik dan kepabeanan, sehingga memperlancar lalu lintas perdagangan internasional dan meningkatkan pendapatan dari pajak perdagangan internasional. Pajak dari perdagangan internasional mengalami penurunan 5 persen pada RAPBN 2017 dibandingkan APBNP 2016. Fraksi PKS menilai Pemerintah belum serius membenahi sektor logistik nasional. Hal ini nampak dari peringkat logistik Indonesia mengalami penurunan dari 53 pada tahun 2014, menjadi 63 pada tahun 2016 (World Bank, 2016). Dimana, salah satu indikator yang mengalami penurunan terbesar adalah kualitas infrastruktur pendukung logistik, yang pada tahun 2014 mencapai 2,92 turun menjadi 2,65 pada tahun 2016.
5. Fraksi PKS juga menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2017 yang direncanakan mencapai Rp240,36 triliun belum optimal. Target PNBP tersebut turun 1,9 persen dari APBNP 2016. Fraksi PKS memandang target PNBP dalam RAPBN 2017 kedepan perlu ditingkatkan kembali, mengingat potensinya yang masih sangat besar. Fraksi PKS memandang optimalisasi PNBP membutuhkan pembenahan yang serius terutama untuk meningkatkan Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, dan pendapatan BLU. Penerimaan PNBP-SDA yang ditetapkan dalam RAPBN 2017 sebesar Rp80,27 triliun, perlu dipertimbangkan ulang. Penerimaan ini masih memungkinkan ditingkatkan jika kebijakan migas baik terkait percepatan produksi, peningkatan lifting, dan renegosiasi untuk memperbaharui harga jual gas. Upaya untuk menutup kebocoran dan efisiensi *cost recovery* baik melalui audit penentuan *cost recovery*, *update negative list cost recovery*, peningkatan *governance* perusahaan juga sangat penting.
6. Pada RAPBN 2017, PNBP SDA non-migas mengalami penurunan sebesar Rp 11 Triliun dibandingkan APBN-P 2016. Fraksi PKS berpendapat bahwa pada dasarnya Pemerintah masih dapat berusaha lebih untuk menggenjot target PNBP SDA non-migas mengingat pada dasarnya potensi PNBP yang begitu besar. Memang terjadi penurunan harga komoditas global yang berpengaruh kepada besaran royalti Mineral dan Batubara yang akan diterima oleh Pemerintah. Akan tetapi, penurunan harga komoditas pada tahun ini diperkirakan tidak akan separah tahun sebelumnya, dan mulai mendekati titik equilibrium harga. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan audit tambang secara seksama untuk mengetahui potensi kebocoran Sumber Daya Alam yang selama ini terjadi. Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mendongkrak PNBP dari sektor tersebut, mengingat besarnya potensi yang ada. Pemerintah harus mendorong penuntasan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih mengalami tumpang tindih lahan dengan kawasan pekebunan dan kehutanan.
7. Terkait dengan pendapatan bagian laba BUMN dalam RAPBN 2016 sebesar Rp38 triliun lebih tinggi 11,2 persen dari target dalam APBNP 2016 perlu dikaji lebih mendalam. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa pengelolaan BUMN harus mengarah sebagai korporasi modern sehingga dapat berkontribusi optimal bagi negara baik melalui dampak ekonomi, pajak dan juga setoran dividen sebagai PNBP. Kontribusi langsung BUMN kepada APBN, secara umum masih relatif rendah jika dibandingkan dengan skala *asset* yang dimiliki. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah merencanakan program–program yang jelas dan terukur untuk memacu kontribusi ekonomi BUMN untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional.

**D. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat**

1. Fraksi PKS menilai bahwa perubahan dari postur belanja negara jangan sampai merugikan kepentingan rakyat. Pemerintah menurunkan belaja negara sebesar 0,5 persen dibandingkan APBNP 2016. Belanja yang bersifat program dan bersentuhan langsung ke masyarakat jangan sampai mengalami pemotongan yang signifikan. Hal ini penting mengingat rendahnya daya beli masyarakat saat ini yang diakibatkan oleh semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan stimulus fiskal melalui belanja program Kementerian/Lembaga menjadi sangat penting. Terkait dengan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan sebesar Rp1.310,43 triliun, Fraksi PKS berpandangan masih perlu dipertajam agar lebih progresif untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tingkat kesenjangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp343,64 triliun atau 26,2 persen di mana jumlah tersebut meningkat sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp322,58 triliun perlu dibenahi secara serius untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga akan memberikan dampak kepada rakyat secara luas. Fraksi PKS menyambut positif peningkatan alokasi untuk fungsi ekonomi Rp332,68 triliun atau 25,4 persen, meski masih disayangkan hanya meningkat sebesar 0,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasi sebelumnya.
2. Fraksi PKS memberikan apresiasi positif atas peningkatan alokasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi dari Rp307,1 triliun dalam APBNP tahun 2016 menjadi sebesar Rp336,9 triliun. Meski demikian, pemerintah perlu benar-benar membenahi proses eksekusi belanja infrastruktur yang selama ini masih berjalan lamban. Kinerja realisasi belanja modal tahun 2015 yang hanya sekitar 80 persen dari pagu harus menjadi catatan serius. Secara komposisi pemerintah harus mempertimbangkan juga proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersifat massif dan padat karya, meningkatkan fasilitas sarana untuk mobilitas masyarakat, barang, jasa, ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi, termasuk sumber daya terbarukan, kegiatan usaha serta menarik investasi yang produktif agar dampak perputaran ekonomi untuk rakyat lebih optimal.
3. Fraksi PKS memberikan apresiasi peningkatan alokasi anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah dan dana desa dari Rp88,0 triliun dalam alokasi APBNP tahun 2016 menjadi Rp133,7 triliun dalam RAPBN tahun 2017 harus diimbangi dengan kebijakan dan sistem pendukung yang kuat agar benar-benar terbelanjakan secara tepat dan tidak menjadi dana yang *idle* di daerah dan tetap akuntabel. Fraksi PKS secara khusus juga mendesak peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan karena kedua sektor ini seharusnya menjadi basis industrialisasi baru yang kokoh dan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu membuka lapangan kerja, membantu petani, nelayan serta masyarakat berpenghasilan rendah sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS berpandangan anggaran infrastruktur terkait logistik, penyediaan energi dan transportasi masal juga perlu mendapatkan perhatian dan alokasi lebih tinggi. Hal ini sangat penting mengingat masih rendahnya daya saing dan terbatasnya infrastruktur nasional yang pada akhirnya menjadi faktor yang menghambat konektivitas serta membuat sistem logistik menjadi sangat mahal.
4. Fraksi PKS berpendapat, bahwa peningkatan pos belanja infrastruktur via transfer daerah perlu diawasi efektifitasnya. Alokasi Anggaran infrastruktur pada RAPBN 2017 mencapai Rp 336 triliun, mengalami pertumbuhan 9,14 persen. Walaupun begitu, alokasi melalui penyertaan modal negara mengalami penurunan, dari awalnya Rp 36 triliun (APBNP 2016) menjadi hanya Rp7,2 triliun (RAPBN 2017). Di sisi lain, anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 51,13 persen, meningkat dari awalnya Rp88 triliun menjadi Rp133 triliun. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut. Kemampuan daerah dalam menyerap anggaran sangat beragam. Data per Juni 2016 menunjukkan bahwa masih ada Rp220 triliun dana Pemerintah Daerah yang mengendap di perbankan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah dana transfer tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh Pemerintah daerah.
5. Fraksi PKS mendesak pemerintah serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai prioritas dengan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersedian, kecukupan dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli rakyat secara luas. Untuk itu alokasi anggaran dalam RAPBN 2017 untuk fungsi kedaulatan pangan sebesar Rp104,0 triliun, turun Rp13,9 triliun dari Rp117,9 triliun dalam APBNP 2016 perlu ditinjau ulang. Selain itu, terkait kedaulatan pangan, Fraksi PKS mendorong agar pemerintah memiliki disain kebijakan yang komprehensif agar sektor pertanian dan kelautan, benar-benar mampu menjadi basis industrialisasi dan pusat pertumbuhan baru ke depan. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa meningkatnya impor bahan pangan adalah salah satu wujud ketidakberhasilan kedaulatan pangan yang selama ini diharapkan menjadi implementasi agenda ke-7 Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan, Fraksi PKS mendesak pemerintah sungguh-sungguh merealisasikan kebijakan Reforma Agraria untuk meningkatkan penguasaan lahan bagi petani sehingga akan meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan pemberian insentif bagi petani dengan perbaikan infrastruktur, penyediaan benih gratis, peningkatan subsidi pupuk, pembiayaan permodalan, asuransi gagal panen bagi petani, peningkatan besaran program ganti rugi lahan puso, bantuan alat dan mesin pertanian serta jaminan pasar untuk produk lokal melalui kebijakan proteksi dan promosi secara integral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan perlu segera menyelesaikan permasalahan lahan-lahan potensial yang bermasalah dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi.
6. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Data menunjukkan bahwa walaupun inflasi secara umum relatif rendah, akan tetapi inflasi harga pangan relatif tinggi, hingga mendekati 10 persen. Oleh sebab itu, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi kunci untuk mencegah inflasi pangan membumbung tinggi yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pos belanja yang bersinggungan langsung dengan peningkatan produksi pangan, seperti pos subsidi pupuk dan benih harus terus ditingkatkan. Pos subsidi pupuk dan benih hanya mengalami peningkatan tipis, dimana secara berturut-turut meningkat sebesar Rp1,15 triliun dan Rp267 miliar. Selain itu, pos anggaran Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur irigasi dan pertanian juga mengalami pemotongan berturut-turut sebesar Rp9,9 triliun dan Rp2,1 triliun.
7. Fraksi PKS memandang kebijakan impor untuk stabilisasi harga pangan adalah kebijakan parsial dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia. Menurut amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban melaksanakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan. Bukan hanya terkait stabilisasi harga pangan. Selain itu, terkait asuransi pertanian, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar tidak hanya memberikan untuk komoditas Padi seperti tahun sebelumnya tapi juga komoditas pertanian lainnya termasuk komoditas ternak karena sesuai amanat UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
8. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp61,72 triliun secara umum masih konsisten memenuhi amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana selama ini didesakkan oleh Fraksi PKS. Fraksi PKS berharap alokasi ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk rakyat yang selama ini masih belum memadai. Kekurangan infrastruktur layanan kesehatan dan masih buruknya layanan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus segera dibenahi oleh pemerintah. Fraksi PKS memandang kebijakan anggaran JKN perlu mendapatkan prioritas yang tinggi dan pelaksanaanya perlu terus disempurnakan. Kepastian agar rakyat miskin mendapatkan fasilitas JKN harus terus dipastikan. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan kebijakan dan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan yang telah secara penuh harus menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM). Fraksi PKS berpandangan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus berjalan secara prima dan berkelanjutan. Fraksi PKS juga mengingatkan terkait kasus vaksin palsu yang terungkap tahun 2016 menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah dan harus segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Fraksi PKS memandang perlu pencermatan ulang dan memastikan efektivitas alokasi anggaran untuk pendidikan di mana dalam RAPBN 2017 mendatang direncanakan mencapai Rp414,1 triliun, melalui Pusat sebesar Rp141,76 triliun dan transfer daerah Rp269,5 triliun. Alokasi yang cukup besar diharapkan mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan guru-dosen, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan proses pendidikan termasuk peningkatan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Fraksi PKS mendesak agar anggaran pendidikan harus mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan berdampak pada peningkatan kualitas manusia Indonesia serta daya saing bangsa. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki kualitas penggunaan anggaran untuk pendidikan. Fraksi PKS meyakini bahwa kunci utama (*key factor* ) dan sumber *leverage* penting untuk menuju Negara yang rakyatnya berpendapatan tinggi (*high income countries*), dan keluar dari *middle income trap*, terletak pada pembangunan SDM. Karena sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan kedepan akan ditentukan produktivitas, inovasi dan *networking* dari sebuah bangsa. Inovasi adalah *engine of growth*, yang akan mengakselerasi proses pembangunan kedepan.
10. Di samping itu, Fraksi PKS juga memandang alokasi pada Fungsi Agama yang mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen apabila dibandingkan dari alokasi dalam APBNP tahun 2016 yaitu Rp9,77 triliun menjadi Rp10,42 triliun di RAPBN tahun 2017 harus benar-benar ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama, terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama serta kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
11. Fraksi PKS mengapresiasi terkait alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp12,31 triliun yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp11 triliun. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk benar-benar mengalokasikan anggaran tersebut untuk mengoptimalkan konservasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan, peningkatan ketahanan terhadap bencana serta konservasi laut, pengendalian dan penyelesaian masalah kebakaran hutan serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
12. Alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp32,77 triliun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan pemukiman yang mengutamakan pada meningkatnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Demikian juga untuk fungsi Pariwisata, di mana alokasi anggaran sebesar Rp5,76 triliun dalam RAPBN tahun 2017 harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian rakyat melalui pengembangan pariwisata. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan *integrated marketing*, perbaikan fasilitas dan akses informasi serta komunikasi pada destinasi-destinasi pariwisata daerah yang potensial sehingga berkembang menjadi pariwisata nasional yang mendunia. Menurut data *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015,* daya saing pariwisata Indonesia berada pada peringkat 50, lebih rendah dari Singapura (11), Malaysia (25), Korea (29), Thailand (35).
13. Fraksi PKS mencermati kenaikan anggaran pada dua kementerian yang sangat berperan di bidang pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan dana sebesar Rp105,56 triliun, meningkat sebesar Rp8,49 triliun dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp97,07 triliun dan Kementerian Perhubungan dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp48,73 triliun, meningkat sebesar Rp5,82 triliun dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp42,9 triliun. Fraksi PKS juga menyoroti secara tajam terkait lambannya kementerian terkait dalam mengeksekusi belanja infrastruktur di tahun sebelumnya dan mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan berbagai infrastruktur tersebut dengan tidak mengesampingkan program padat karya dan selalu mengutamakan tenaga kerja asli Indonesia.
14. Fraksi PKS juga mempertanyakan komitmen Pemerintah untuk mengatasi *backlog* 13,5 juta unit rumah (BPS, 2014). Komitmen tersebut belum nampak pada RAPBN 2017 yang justru menurunkan anggaran untuk fungsi perumahan sebesar 4,6 persen dibandingkan APBNP 2016. Problematika *backlog* ini menjadi isu serius mengingat setiap tahunnya *backlog* akan bertambah sebesar 800-900 ribu, dan terdapat 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Pada dasarnya Pemerintah punya senjata untuk mengatasi hal tersebut yang bernama UU Tapera. Pemerintah dapat mengoptimalkan UU tersebut dengan mengawasi pelaksanaannya, membantu dalam penyediaan lahan murah, menindak apabila terjadi kerumitan perizinan pembangunan perumahan, dan memberikan penugasan kepada Perumnas untuk membangun perumahan subsidi.
15. Terkait dengan alokasi anggaran untuk fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2017 sebesar Rp104,58 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4 persen dibandingkan alokasi anggaran daam APBNP tahun 2016 yang sebesar Rp109 triliun, perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini sangat penting mengingat pentingnya kekuatan pertahanan dengan melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (*Minimum Essential Forces/MEF*), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya. Fraksi PKS juga memandang alokasi ini harus berdampak untuk memperkokoh industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Anggaran pertahanan perlu menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan aparatur pertahanan yang profesional dan sistem pertahanan yang kuat. Kesejahteraan prajurit, peremajaan dan penambahan alutsista menjadi dua faktor utama penunjang pertahanan. Kesejahteraan prajurit menjadi modal utama terbentuknya profesionalisme prajurit, peremajaan alutsisa dibutuhkan untuk meminimalisir gugurkan prajurit dalam menjalankan tugas dan penambahan alutsista dibutuhkan untuk menutup celah pertahanan sehingga tidak ada lagi sejengkal wilayah tanah air yang tidak terlindungi. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa alokasi anggaran pertahanan sesungguhnya dapat memiliki dampak ekonomi yang besar dengan berkembangnya industri pertahanan dan alutsista nasional dan akan mereduksi ketergantungan dari impor.
16. Anggaran Keamanan di dalam RAPBN 2017 sebesar Rp72,43 triliun, turun dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp79,3 triliun. Penurunan anggaran keamanan tersebut perlu dicermati lebih mendalam dikarenakan ancaman keamanan khususnya separatisme dan terorisme masih cukup tinggi. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan pilkada serentak tahap ke 2, tentunya diperlukan langkah antisipasi dan penanganan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut.
17. Pada tahun 2017, Indonesia akan kembali menggelar pelaksanaan pilkada serentak tahap ke 2 yang akan digelar di 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Walaupun menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditegaskan anggaran pilkada menjadi beban APBD, akan tetapi Pemerintah Pusat harus memperhatikan anggaran KPU Pusat dan BAWASLU sebagai supervisi pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Anggaran KPU Pusat didalam RAPBN 2017 sebesar Rp1,85 triliun, menurun dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp1,91 triliun. Sedangkan anggaran BAWASLU didalam RAPBN 2017 sebesar Rp 485 M, naik dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp463 M. Penurunan anggaran KPU Pusat di dalam RAPBN 2017 perlu dipastikan tidak akan mengganggu persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2017.
18. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah kongkret dalam rangka perlindungan generasi, terutama terkait dengan maraknya kejahatan terhadap anak, narkoba, minuman beralkohol, kejahatan seksual, serta perdagangan manusia. Dibutuhkan kebijakan signifikan dan dukungan alokasi anggaran yang memadai terkait hal tersebut, yang diharapkan dapat tercermin dalam APBN 2017 nantinya. Khusus terkiat permasalah narkoba yang meluas, alokasi anggaran BNN didalam RAPBN 2017 sebesar Rp1,39 triliun, yang turun dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp2,53 triliun, perlu dicermati lebih mendalam dalam kaitan dengan kinerja pemberantasan peredaran narkoba ataupun menekan angka penggunaan narkoba.
19. Fraksi PKS memandang bahwa alokasi belanja subsidi dalam RAPBN 2017 yang sebesar Rp174,91 triliun harus dibahas lebih mendalam. Terutama untuk kebijakan subsidi energi yang mencapai Rp92,17 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp42,31 triliun, subsidi listrik sebesar Rp48,55 triliun, dan subsidi energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp1,3 triliu. Pemerintah perlu memastikan agar subsidi energi didukung kebijakan pengaturan dan diversifikasi energi yang kuat, serta sistem distribusi yang lebih baik dan tepat sasaran. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa pemerintah harus lebih serius mengalokasikan pasokan gas untuk PLN, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, serta menurunkan *lossess* jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional. Kebijakan subsidi energi juga harus didukung kebijakan harga yang tepat sehingga tidak memukul daya beli rakyat akibat kenaikan tarif sebagaimana terjadi selama ini.
20. Fraksi PKS memandang bahwa alokasi belanja subsidi non energi yang mencapai Rp82,74 triliun dalam RAPBN tahun 2017 yang terdiri dari subsidi pangan sebesar Rp19,78 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp31,15 triliun, subsidi benih sebesar Rp1,29 triliun, subsidi PSO sebesar Rp4,3 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp15,84 triliun, serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp10,34 triliun harus benar-benar didukung dengan basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, sehingga kebijakan subsidi semakin adil dan tepat sasaran.
21. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan sosial sebesar Rp158,47 triliun dalam RAPBN tahun 2017 atau meningkat sebesar 5,1 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp150,84 triliun harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, menjaga kualitas hidup masyarakat, serta mendukung penyempurnaan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan tepat sasaran.

**E. Transfer Daerah dan Dana Desa**

1. Fraksi PKS memandang bahwa berkurangnya dana transfer hingga sebesar Rp 29,4 triliun menjadi Rp700 triliun dibandingkan APBNP 2016 perlu menjadi perhatian serius. Terutama, penyebab terbesar berkurangnya dana transfer berasal dari berkurangnya Dana Transfer Khusus (berkurang Rp 34 triliun), khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik yang berkurang hingga Rp 29 triliun.
2. Pemerintah perlu pro-aktif mendorong daerah untuk menggunakan dana APBD agar tidak hanya mengendap di bank. Hingga Juni 2016, diperkirakan terdapat Rp 220 Triliun dana APBD yang mengendap di perbankan nasional maupun daerah. Hal ini sangat disayangkan karena pada dasarnya dana tersebut dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian Indonesia dan memiliki potensi untuk menciptakan *multiplier effect* yang besar. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan *reward* and *punishment* yang dikaitkan dengan realisasi belanja daerah. Selain itu pemerintah harus benar-benar mampu melakukan koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah secara efektif.
3. Fraksi PKS mendorong agar anggaran transfer ke daerah perlu dipastikan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup rakyat di daerah. Anggaran dana transfer ke daerah secara umum semakin tinggi, tetapi ternyata masih didominasi untuk pengeluaran belanja pegawai dan barang. Harus ada upaya-upaya sistematis agar peningkatan transfer daerah ini tidak hanya habis untuk belanja pegawai dan belanja untuk birokrasi lainnya.
4. Fraksi PKS mengapresiasi kebijakan Pemerintah untuk meningkat jumlah anggaran dana desa hingga sebesar 27,7 persen menjadi Rp60 triliun pada RAPBN 2017. Meski demikian, alokasi tersebut masih perlu ditingkatkan secara lebih signifikan agar berdampak pada pembangunan desa, kesejahteraan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dipelosok-pelosok desa. Dana Desa seharunya lebih besar dan mampu memenuhi mandat UU Desa. Dana desa dibutuhkan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Fraksi PKS mendorong agar alokasi Dana Desa juga diprioritaskan untuk fungsi ekonomi produktif lebih besar dibanding dengan infrastruktur fisik.
5. Alokasi transfer daerah dan dana desa yang semakin besar diharapkan juga didukung oleh kebijakan untuk mendorong penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru didaerah-daerah unggulan dan potensial. Baik berbasis pariwisata, maritim, pertanian, maupun dengan produk unggulan yang lain.

**F. Keseimbangan Primer, Defisit dan Pembiayaan**

1. Fraksi PKS juga mencermati Keseimbangan Primer yang defisit semakin tinggi, mencapai Rp111,43 triliun, meningkat Rp5,9 triliun dari APBNP 2017, yang mencerminkan APBN yang tidak sehat kekurang mandirian fiskal. Pemerintah telah memahami bahwa jika keseimbangan primer telah defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang. Keseimbangan primer yang negatif merupakan indikator bahwa pemerintah meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menekan defisit keseimbangan primer.
2. Terkait dengan defisit dalam RAPBN tahun 2017 yang diajukan sebesar Rp332,83 triliun atau 2,41 persen dari PDB, secara umum Fraksi PKS memandang defisit APBN selama ini masih bersifat tidak produktif. Hal ini karena masih tingginya alokasi anggaran birokasi yang tidak efisen, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, serta potensi kebocoran berbagai belanja lainnya yang masih tinggi.
3. Terkait peningkatan jumlah utang yang signifikan, terutama rencana penerbitan Surat Berharga Negara (netto) sebesar Rp404,31 triliun atau meningkat sekitar Rp40 triliun dibanding APBNP 2016, Fraksi PKS mendesak pemerintah mengkaji lebih mendalam. Fraksi PKS menilai pemerintah perlu lebih memprioritaskan penerbitan *project-based sukuk* (sukuk negara dengan *underlying* proyek) agar dapat mendorong disiplin fiskal lebih baik dan berdampak langsung pada dinamika sektor riil.
4. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembiayaan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan asset dan investasi serta piutang-piutang Negara yang bermasalah agar dapat menjadi penerimaan Negara.
5. Fraksi PKS memandang manajemen utang yang ketat dan efektif belum di desain secara lebih baik ditengah beban hutang yang semakin tinggi. Beban bunga utang dalam RAPBN 2017 sebesar Rp221,40 triliun meningkat Rp30 triliun dari APBNP 2016, lebih 10 persen dari total pendapatan negara. Terkait penarikan utang, harus dikaji lebih mendalam, mengingat realisasi serapan anggaran yang juga tidak optimal dan defisit APBN yang masih bersifat tidak produktif.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangan-nya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

**Wabillahi taufiq wal hidayah**

**Wassalaamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Jakarta, 20 Dzulqa’dah 1437 H**

**23 Agustus 2016**

**PIMPINAN FRAKSI**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR-RI**

**Ketua, Sekretaris,**

**DR. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA DR. H. Sukamta**

**No. Anggota: A-117 No. Anggota : A-113**